

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka disusunlah Revisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2021, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2016 -2021. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2021.

Renstra sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan dokumen Renstra tersebut berpedoman pada prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, Program dan Kegiatan serta pendanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD dimaksud, dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana strategis (Renstra) tersebut merupakan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis tersebut menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).
 20. Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen, adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan Program dan kegiatan pengembangan e-Government serta pengelolaan informasi publik di Kabupaten Sragen.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan e-Government dan pengelolaan informasi publik di Kabupaten Sragen.
3. Memberikan memberikan arah pengembangan e-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat yang cepat dan transparan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tahun 2016 – 2021 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, menguraikan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD, menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tentang tujuan dan sasaran SKPD dalam pencapaian target dalam RPJM
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN berisi Strategi dan Kebijakan yang diambil SKPD untuk mencapai tujuan sesuai dengan Tupoksi dan arah kebijakan dalam RPJM.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi Rencana Program, Kegiatan, serta pendanaan indikatif di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan sesuai dengan kebijakan dalam RPJM.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- BAB VIII PENUTUP merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika periode 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan SKPD di Kabupaten Sragen yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen saat ini memiliki sumber daya aparatur sebanyak 45 orang yang terdiri dari PNS dan Non PNS yang tersebar dalam 3 (tiga) bidang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengalami keberhasilan dengan diperolehnya beberapa penghargaan diantaranya Juara I INAICTA Tahun 2011, Juara II Penghargaan Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat Nasional pada Tahun 2014 dan Juara III Penghargaan Indonesia Digital Society Award (IDSA) Tingkat Nasional pada Tahun 2015 serta Juara I Indonesia Digital Economy Award (IDEA) Tahun 2016.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki permasalahan dalam menjalankan program dan kegiatannya terutama dalam hal pengembangan jaringan teknologi informasi dan pelayanan informasi publik. Diantaranya adalah masalah alih teknologi infrastruktur jaringan dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum optimalnya fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sragen. Namun demikian keterbatasan tersebut tidak menurunkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola teknologi informasi.

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen menyelenggarakan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK, pendayagunaan TIK dan Kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK dan pendayagunaan TIK;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK dan pendayagunaan TIK;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengelolaan infrastruktur TIK dan pendayagunaan TIK;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 2 (dua) Kasubag yaitu :
 - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kasubag PEP dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu :
 - 1) Kasie Pelayanan Informasi Publik
 - 2) Kasie Media Komunikasi
 - 3) Kasie Penyelenggaraan Tata Kelola TIK
4. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu :
 - 1) Kasie Pusat Data dan Jaringan TIK
 - 2) Kasie Pengembangan Sistem Informasi
 - 3) Kasie Keamanan Informasi
5. Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu:
 - 1) Kasie Sandi dan Telekomunikasi
 - 2) Kasie Pemberdayaan Teknologi Informasi
 - 3) Kasie Monitoring dan Pengendalian TIK

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada gambar 2.1 (*terlampir*):

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan struktur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen memiliki komponen aparatur sebagai berikut:

Tabel 2.2
Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasubag/Kasie	11
5.	Staf PNS	14
6.	Staf Non PNS	5
	Jumlah	35

B. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki berbagai sumber daya yang dapat menunjang kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Komposisi aparatur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu berdasarkan pangkat, golongan, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Adapun jumlah aparatur Berdasarkan Pangkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II	-
3.	Eselon III	4
4.	Eselon IV	10
	Jumlah	14

Dari tabel di atas terlihat bahwa aparatur yang memiliki eselon di Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 14 (empat belas) orang dengan posisi Eselon

IV merupakan eselon terbanyak. Sedangkan komposisi aparatur yang berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	23
3.	Golongan II	4
4.	Golongan I	-
	Jumlah	30

Berdasarkan table 2.3 diatas dapat terlihat bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar pegawainya merupakan pegawai dengan Golongan III yaitu sebanyak 23(dua puluh tiga) orang. Adapun komposisi aparatur berdasarkan jenjang pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S2)	12
2.	Sarjana (S1)	12
3.	Diploma (D3)	3
4.	SMA/Sederajat	3
	Jumlah	30

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki komposisi paling besar adalah aparatur yang memiliki jenjang pendidikan Magister (S2) dan jenjang pendidikan Sarjana (S2), hal ini dapat menjadi kekuatan bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan jenjang pendidikan yang paling rendah adalah setingkat SMA.

Selain sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Antara lain sebagai berikut:

1. Mobil Operasional = 2 unit
2. Sepeda motor = 8 unit
3. Komputer = 20 unit
4. Laptop = 6 unit

Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki sarana dan prasarana lainnya sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa peralatan dan perlengkapan kantor.

C. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode sebelumnya (2011-2016) dapat dilihat melalui 2 hal, yaitu melalui hasil capaian kinerja dan melalui penyerapan anggaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Sragen, Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan dan Kominfo serta Subag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sragen karena Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penggabungan dari Kantor Pengelola Data Elektronik, Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan dan Kominfo serta Subag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sragen. Dimana hasil kinerja ini kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan 5 tahun mendatang (2016-2021) sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik lagi dan mampu memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada periode sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2011 – 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Anggaran

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18
Urusan Komunikasi dan Informatika	365.448.000	1.373.929.000	1.284.130.000	1.551.114.000	1.520.381.000	358.414.015	1.220.563.978	1.258.534.751	1.490.178.185	1.440.556.827	98%	89%	98%	96%	95%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	36.878.000	67.240.000	64.376.000	186.471.000	187.925.000	35.126.515	60.951.811	63.164.501	164.478.685	176.974.808	95%	91%	98%	88%	94%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	4.800.000	4.800.000	9.600.000	15.000.000	3.974.515	4.482.011	4.767.401	7.657.185	13.393.508	83%	93%	99%	80%	89%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	0	2.190.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	0	2.148.700	1.423.500	1.541.500	1.155.500	0%	98%	75%	86%	64%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0	6.180.000	28.695.000	0	0	0	6.180.000	23.595.000	0%	0%	0%	100%	82%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	755.000	1.712.000	2.055.000	2.075.000	2.000.000	755.000	1.712.000	2.055.000	2.075.000	2.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.600.000	13.600.000	8.400.000	15.200.000	15.000.000	9.600.000	13.600.000	8.400.000	14.525.000	15.000.000	100%	100%	100%	96%	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.087.000	13.990.000	12.764.000	15.607.000	14.820.000	12.087.000	13.990.000	12.764.000	15.607.000	14.820.000	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang dan Penggandaan	1.241.000	1.338.000	1.135.000	802.000	936.000	1.241.000	1.280.600	1.135.000	802.000	936.000	100%	96%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	15.000.000	7.050.000	85.000.000	69.000.000	0	11.150.000	7.050.000	84.350.000	68.900.000	0%	74%	100%	99%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan	0	1.900.000	2.280.000	2.280.000	2.540.000	0	1.900.000	2.280.000	2.280.000	2.540.000	0%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000	6.200.000	4.410.000	5.412.000	5.334.000	4.074.000	5.581.000	4.020.000	5.016.500	4.994.000	81%	90%	91%	93%	94%
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3.395.000	6.510.000	19.582.000	42.515.000	32.800.000	3.395.000	5.107.500	19.269.600	24.444.500	29.640.800	100%	78%	98%	57%	90%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	10.400.000	31.950.000	39.792.000	49.820.000	66.520.000	10.400.000	31.577.500	39.786.800	48.832.850	50.473.800	100%	99%	100%	98%	76%

Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	0	0	0	0	16.500.000	0	0	0	0	15.400.000	0%	0	0%	0%	93%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.400.000	31.950.000	39.792.000	49.820.000	50.020.000	10.400.000	31.577.500	39.786.800	48.832.850	35.073.800	100%	99%	100%	98%	70%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	3.300.000	0	0	4.000.000	0	2.700.000	0	0	4.000.000	0%	82%	0%	0%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	3.300.000	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0%	82%	0%	0%	0%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0%	0%	0%	0%	100%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	119.000.000	685.016.000	669.023.000	792.798.000	565.950.000	113.967.500	651.364.450	654.030.450	774.295.970	564.351.000	96%	95%	98%	98%	100%
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	119.000.000	372.000.000	315.000.000	286.346.000	270.100.000	113.967.500	368.255.450	311.267.450	285.369.970	269.811.000	96%	99%	99%	100%	100%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (SIMPATEN)	0	212.416.000	0	0	0	0	194.509.000	0	0	0	0%	92%	0%	0%	0%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi VoIP	0	100.600.000	0	0	0	0	88.600.000	0	0	0	0%	88%	0%	0%	0%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (Update Website)	0	0	22.720.000	24.090.000	25.600.000	0	0	22.720.000	24.090.000	25.600.000	0%	0%	100%	100%	100%
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	0	0	166.000.000	446.000.000	160.000.000	0	0	163.700.000	429.789.000	159.000.000	0%	0%	99%	96%	99%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (SIM Surat Keterangan Desa)	0	0	55.216.000	0	0	0	0	55.216.000	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (Kerjasama BPPT)	0	0	110.087.000	0	0	0	0	101.127.000	0	0	0%	0%	92%	0%	0%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (Website PPID)	0	0	0	8.433.000	0	0	0	0	7.953.000	0	0%	0%	0%	94%	0%

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (Pileg dan Pilpres)	0	0	0	27.929.000	0	0	0	0	27.094.000	0	0%	0%	0%	97%	0%
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Akta Kelahiran SEMEDI	0	0	0	0	39.610.000	0	0	0	0	39.450.000	0%	0%	0%	0%	100%
Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi e-PBB	0	0	0	0	25.640.000	0	0	0	0	25.640.000	0%	0%	0%	0%	100%
Pembangunan Jaringan Perpusseru	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0%	0%	0%	0%	100%
Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi Pilihan Bupati	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	29.850.000	0%	0%	0%	0%	0%
Program Pengembangan Data/Informasi	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	69.800.000	0%	0%	0%	0%	100%
Pengumpulan, Updeting dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	69.800.000	0%	0%	0%	0%	100%
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	0	55.248.000	160.939.000	60.975.000	125.361.000	0	52.695.800	153.553.000	55.403.680	106.358.000	0%	0%	95%	91%	85%
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (PATEN)	0	12.752.000	0	50.010.000	63.200.000	0	12.752.000	0	45.318.680	53.600.000	0%	0%	0%	91%	85%
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (Operator IT Wil Kec. Sragen)	0	6.886.000	0	0	0	0	6.886.000	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	0	35.610.000	60.000.000	0	0	0	33.057.800	57.512.000	0	0	0%	0%	96%	0%	0%
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Open Source)	0	0	15.227.000	0	0	0	0	15.227.000	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan KTP Desa)	0	0	85.712.000	0	0	0	0	80.814.000	0	0	0%	0%	94%	0%	0%
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (BLC)	0	0	0	10.965.000	52.512.000	0	0	0	10.085.000	43.109.000	0%	0%	0%	92%	82%
Pelatihan dan diklat troubleshooting TIK	0	0	0	0	9.649.000	0	0	0	0	9.649.000	0%	0%	0%	0%	100%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	199.170.000	531.175.000	350.000.000	461.050.000	500.625.000	198.920.000	421.274.417	348.000.000	447.167.000	468.599.219	100%	0%	99%	97%	94%
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	199.170.000	401.500.000	350.000.000	363.000.000	346.000.000	198.920.000	292.071.417	348.000.000	359.600.000	321.535.719	100%	0%	99%	99%	93%
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (Bandwidth LPSE)	0	0	0	72.000.000	72.000.000	0	0	0	62.392.000	71.900.500	0%	0%	0%	87%	100%
Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik (SIM KTP)	0	55.000.000	0	0	0	0	54.778.000	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (SIM SARASWATI)	0	74.675.000	0	0	0	0	74.425.000	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (SMS Center)	0	0	0	26.050.000	0	0	0	0	25.175.000	0	0%	0%	0%	97%	0%
Operasional LPSE	0	0	0	0	41.072.000	0	0	0	0	33.710.000	0%	0%	0%	0%	82%
Update Aplikasi SIPEMDES	0	0	0	0	41.553.000	0	0	0	0	41.453.000	0%	0%	0%	0%	100%

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Urusan Komunikasi dan Informatika											
1	Jumlah jenis pelayanan secara online	Jenis	2	4	6	8	10	2	4	6	24	26
2	Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet	SKPD	15	18	22	25	28	65	65	65	65	65
3	Jumlah website/blog resmi SKPD	website/blog	15	18	22	25	28	15	18	23	28	55
4	Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif	website/blog	15	18	22	25	28	15	18	20	20	28
5	Presentasi jumlah website aktif dengan jumlah SKPD yang memiliki website	%	75	75	75	75	75	100	100	86,96	71,43	50,91
6	Jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan TIK	Orang	0	20	30	50	100	0	34	95	156	481

Dari tabel realisasi anggaran dan target kinerja diatas dapat terlihat bahwa untuk penyerapan anggaran hampir semua program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat terserap dengan baik dengan capaian kinerja yang cukup baik. Sedangkan untuk kinerja pelayanan ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dengan maksimal yaitu pada indikator kinerja Presentasi jumlah website aktif dengan jumlah SKPD yang memiliki website. Hal ini disebabkan karena pada SKPD yang memiliki website/blog tersebut tidak semua memiliki petugas yang secara khusus mengelola website/blog tersebut sehingga website/blog menjadi tidak uptodate.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Tantangan

- a. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat mengakibatkan infrastruktur yang sudah dibangun dan dimiliki dapat menjadi cepat usang (ketinggalan).
- b. Minimnya anggaran mengakibatkan sulitnya mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat
- c. SDM yang ada jika tidak selalu ditingkatkan kemampuannya akan ketinggalan kapasitas dan kompetensinya.
- d. Kurangnya SDM pengelola jaringan mengakibatkan kurang cepatnya proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan.

2. Peluang

- a. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar.
- b. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Semakin pentingnya peranan teknologi informasi, terutama untuk menunjang system manajemen pemerintahan e-Government dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
- d. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.
- e. Tersedianya tenaga teknis bidang TIK yang rata-rata berusia relatif muda, memiliki semangat dan kinerja tinggi, serta potensial untuk dikembangkan kompetensinya.
- f. Kebijakan merombak sistem birokrasi pemerintahan menjadi miskin struktur kaya fungsi, memungkinkan untuk dibentuk kelompok jabatan fungsional peneliti dan pranata/ahli komputer.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dalam pencapaian optimalisasi sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan
 - Belum kuatnya payung hukum penyelenggaraan e-Government di Kabupaten Sragen. (Saat ini baru Perbup belum Perda).
2. Infrastruktur
 - Perlunya *upgrade* infrastruktur jaringan TIK disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan banyaknya *user*.
 - Kondisi jaringan TIK belum sepenuhnya sesuai standart keamanan (ISO 27000)
3. Aplikasi
 - Belum optimalnya *interoperabilitas*(integrasi) database antar instansi pemerintah
 - Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan Sistem Informasi.
 - Belum semua aplikasi elektronik bersifat *user friendly*
 - Belum optimalnya implementasi keamanan informasi dan persandian
4. Kelembagaan
 - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dalam pengelolaan teknologi informasi.
 - Belum optimalnya fungsi dari Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
 - Kurang optimalnya fungsi Radio untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen
5. Perencanaan
 - Banyaknya aktivitas *backoffice & front office* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bisa dikembangkan dengan sistem elektronik sehingga perlu membuat prioritas.
 - Pesatnya pertumbuhan teknologi network di dunia, sehingga perlu skala prioritas penerapan teknologi jaringan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berikut telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dimuat dalam RPJMD.

VISI :

“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”

Frase Visi :

1. **Bangkit** adalah sebuah tindakan yang berangkat dari keyakinan untuk bangun menggugah dan membangkitkan seluruh potensi agar aktif dan proaktif bergerak melakukan pembangunan.
2. **Bersama** dimaksudkan pemerintah berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat Sragen di setiap bidang pembangunan yang menyangkut hidup dan kehidupan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. **Sejahtera** dimaksudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang diharapkan adalah kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi disamping mewujudkan kesejahteraan dalam konteks lahiriyah dan materi dengan upaya meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi melalui pembentukan karakter mandiri yang didukung dengan nilai-nilai kearifan lokal dan jati diri masyarakat Sragen, sangat penting melengkapinya dengan pemenuhan kesejahteraan jiwa dan batiniah agar setiap manusia dapat memerankan diri secara optimal sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi (kholifah). Kesejahteraan yang hakiki adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna.
4. **Bermartabat** dimaksudkan bahwa program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah bersama-sama seluruh elemen masyarakat harus mampu membentuk karakter masyarakat yang memiliki harkat dan kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih

baik, dan padagilirannya nanti sragen diharapkan menjadi teladan kemajuan bagi daerahlainnya.

Dari uraian visi diatas dijabarkan dalam Misi Bupati Sragen 2016 - 2021 sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari Misi Bupati dapat ditarik misi yang paling sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai berikut :

MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan

tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.

MISI 2 : Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan. Mewujudkan Kabupaten Sragen yang nyaman melalui perencanaan tata ruang yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, pengembangan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan lain-lain.

MISI 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang pendidikan formal dan informal, meningkatkan kualitas tenaga pendidik

dan kependidikan, yang didukung pengembangan sarana prasarana pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang memadai.

C. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2015 – 2019 sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Sedangkan berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 bidang komunikasi dan informatika memiliki tujuan yaitu meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi. Dan berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika tidak banyak memiliki kaitan langsung dengan rencana RT/RW maupun KLHS, namun disini Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menangkap peluang dimana titik-titik yang memungkinkan memperluas jaringan TIK untuk mempermudah masyarakat mengakses jaringan TIK tersebut.

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan
 - Perlunya payung hukum yang lebih kuat terkait TIK
 - Pentingnya peranan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan transparan
2. Infrastruktur
 - Belum optimalnya performa jaringan TIK karena infrastruktur yang sudah ketinggalan jaman
 - Belum terpenuhinya *security system* secara optimal dalam implementasi TIK
3. Aplikasi
 - Perlunya interoperabilitas database pada semua instansi
 - Perlunya up date data website secara berkesinambungan
 - Perlunya pengoptimalan implementasi keamanan informasi dan persandian
4. Kelembagaan
 - Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang TIK
 - Perlunya peningkatan fungsi PPID Kabupaten Sragen dalam memberikan layanan informasi publik
 - Keterbatasan jumlah SDM baik administrasi maupun teknis
 - Pengoptimalan fungsi Radio untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen
5. Perencanaan
 - Perlunya peran serta stakeholders dalam penyusunan *blue print tentang implementasi TIK*

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai sehingga tujuan tidak tercapai. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (Tahun 2016-2021) . Untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah

- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian.**
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, konkrit, lebih jelas dan selalu terikat kerangka waktu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sragen adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Dari sasaran diatas memiliki masing-masing 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan layanan berbasis TIK, mengingat TIK sangat mendukung kegiatan pelayanan cepat dan tepat yang dilakukan oleh PD. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan TIK}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD, mengingat persandian sangat penting dalam menjaga kerahasiaan suatu informasi. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD}}{\text{Jumlah total PD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sragen guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari Kemenpan RB yang meliputi evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sragen guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. • Formulasi Pengukuran: Hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat dengan indikator penilaian yaitu mengumumkan dan menyediakan informasi publik, melayani dan mengelola informasi publik. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	%	30	45	60	80	90	95	100	100
2	Persentasi PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	%	0	0	-	10	30	40	50	50
3	Indeks SPBE	Indeks	2	2	-	2,5	3	3,2	3,3	3,3
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	-	-	-	24	30	40	50	50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2016 - 2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi, misi beserta tujuan dan sasarannya, maka dilakukan berlandaskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis IT melalui pembuatan aplikasi/sistem informasi bagi semua PD dan mengoptimalkan pemanfaatannya
2. Menyediakan sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat dan handal melalui sistem elektronik maupun LPPL Buana Asri
3. Menjalin kemitraan dengan menggandeng komunitas TIK di Sragen, Perguruan Tinggi serta Lembaga yang membidangi TIK baik Pusat maupun Daerah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sragen yang melek IT
4. Meningkatkan infrastruktur TIK menjadi lebih handal dan tidak ketinggalan jaman.
5. Mengimplementasikan keamanan informasi dan persandian di Kabupaten Sragen
6. Penyusunan payung hukum yang mengikat dalam penyelenggaraan TIK di Kabupaten Sragen
7. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui diklat keahlian, workshop, seminar serta praktek lapangan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan fasilitas teknologi informasi secara sehat, aman dan produktif

Dari keenam strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan informasi publik melalui sistem elektronik maupun LPPL Buana Asri
2. Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mengembangkan e-Government dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

3. Penyediaan koneksi serat optik/fiber optic untuk performa jaringan TIK yang lebih handal
4. Peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik melalui implementasi keamanan informasi dan persandian
5. Bekerjasama dengan stakeholders dan OPD dalam penyusunan Regulasi TIK
6. Pengiriman SDM TIK untuk mengikuti kursus, diklat, sertifikasi TIK
7. Penggunaan fasilitas teknologi informasi secara aman, sehat dan produktif
8. Meningkatkan literasi TIK kepada masyarakat di Kabupaten Sragen

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen menggunakan analisis SWOT dalam menganalisa faktor-faktor internal (kelemahan dan peluang) maupun eksternal (peluang dan ancaman) dalam penerapan TIK sebagai berikut :

A. Strength (Kekuatan)

- Kepemimpinan atau leadership yang kuat terhadap komitmen pengembangan TIK
- Jaringan Informasi dan Komunikasi (Jaringan online Pemkab Sragen) telah mencapai seluruh SKPD dan wilayah Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.
- Pengembangan e-government masuk dalam Visi Misi dan RPJM Bupati.
- Adanya pengawasan oleh system terhadap penggunaan konten dan akses internet maupun intranet.

B. Weaknesses (Kelemahan)

- Kurangnya aturan-aturan mengenai TIK yang dilegalkan
- Belum memadainya SOP dan manual book pembangunan system informasi dan jaringan komunikasi terpadu.
- Belum mencukupinya kuantitas SDM di Bidang TI sebagian bekerja di KPDE dan SKPD tertentu
- Aplikasi untuk pelayanan masyarakat dan dunia usaha masih terbatas

C. Opportunities (Peluang)

- Pengembangan jaringan lebih luas relatif mudah karena kondisi geografis yang rata
- Penerapan TIK lebih lanjut cukup menjanjikan karena SDM di Dinas Kominfo cukup kompeten dan berkomitmen.
- Pengembangan e-society dan e-business akan mendapat dukungan, terlihat dari respon positif masyarakat atas beberapa layanan publik yang telah diluncurkan Pemkab Sragen.

D. Threats (Ancaman)

- Pergantian jabatan beresiko karena mempengaruhi penerapan TIK jika system belum terimplementasi sepenuhnya.
- Wewenang Dinas Kominfo yang cukup terbatas dapat mengakibatkan penerapan TIK terkendala.
- Dana pengembangan dan pemeliharaan fasilitas TIK yang terbatas dapat menurunkan kinerja penerapan TIK terutama pengoperasian peralatan TIK yang kurang optimal.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program Dinas Kominfo Kabupaten Sragen untuk tahun 2016-2021 sebagai implementasi dari RPJMD adalah sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen

Program	Kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	Penyediaan alat tulis kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan makanan dan minuman
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Penyediaan alat-alat kelistrikan
Penyediaan jasa kebersihan dan pengemudi	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor

	Pengadaan Mebeulair
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor (terpeliharanya PABX)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
	Pembangunan jaringan Fiber Optic (Main Road)
	Pembangunan jaringan Fiber Optic (Kecamatan)
	Penyediaan jaringan Metro (sewa jaringan FO)
	Pembangunan Free Hotspot
	Migrasi frekuensi jaringan
	Pengadaan Security Ruangan
	Pembangunan Jaringan TIK
	Penyediaan Data Center
	Penyediaan Akses Free Internet di Area Publik
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi dan informasi - Penyediaan SDM IT (outsourcing)
	Penyediaan Toolkit IT
	Colocation dan Webhosting
	Upgrade Perangkat TIK
	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Penyediaan Perangkat Security
	Surveillance Audit Iso 27000 dll
	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi - Pengadaan Sound System, LCD Proyektor
	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi - Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Teknologi Informasi
	Survey Kepuasan Pengguna TIK
	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

	Pengkajian dan pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik
	Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Masa Depan (Android)
	Public Key Infrastruktur
	Oracle Database
	Aplikasi Interaktif Eksekutif Dashboard Berbasis Peta dan Grafik, disertai kajian-kajian teknis dari wali data (pemilik data)
	membuat portal A to Z Kab. Sragen
	Pengadaan website SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan
	update website
	Penyusunan regulasi Pengelolaan dan Perlindungan Informasi milik Pemerintah Daerah
	Perumusan daftar informasi yang dikecualikan
	Fasilitasi pengklasifikasian tingkat kerahasiaan informasi di OPD
	Perumusan pedoman/SOP klasifikasi informasi milik pemerintah daerah
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) – 1
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) – 2
	Diseminasi Informasi Media Radio
	Penyusunan CellPlan Menara Telekomunikasi
	Penyusunan Perbup Tentang Warnet dan Game Online
	Penyusunan Perbup Menara Telekomunikasi
	Penyusunan Sistem Informasi CellPlan
	Pelaksanaan Sosialisasi dan pembinaan warnet dan Game online
	Pelaksanaan Sosialisasi, pendataan, pembinaan perijinan jasa titipan dan kantor agen
	Pemeliharaan Gedung Auditorium
Pengkajian dan Penelitian bidang komunikasi dan informasi	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga kerjasama pengembangan TIK dengan pihak ketiga
	Audit Sistem Informasi dan Jaringan
	Konsultasi Redesign web PDE, web PPID

	update website BLC
	Update hardware yang mendukung komunikasi di di Kabupaten Sragen (PABX)
	Instalasi dan pengelolaan akun perangkat lunak persandian
	Instalasi dan pengelolaan administrasi perangkat keras persandian
	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat keras dan perangkat lunak persandian
	Identifikasi pengguna, pengelola dan infrastruktur komunikasi yang ada di pemda
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
	Pelatihan IT di Broadband Learning Center (BLC)
	Keikutsertaan dalam Diklat Pembentukan Sandiman
	Keikutsertaan dalam Diklat Teknis
	Penyelenggaraan Pelatihan/Bintek/Asistensi/Workshop bagi perwakilan OPD
	Penyelenggaraan Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi bagi Pejabat OPD
	Penyelenggaraan Sosialisasi Layanan dan Pemanfaatan Persandian bagi Pejabat OPD
	Bintek PPID
	Pelatihan Komputer dan Internet untuk KIM
	Pelatihan Kewirausahaan untuk KIM
Kerjasama informasi dan media massa	Kegiatan Dewan TIK Kabupaten
	Operasional Komunitas IT
	lomba inovasi aplikasi e-government
	Keikutsertaan dalam pameran TIK
	Publikasi Penerapan Teknologi Informasi
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
	pembuatan film pendek e-Gov Kab. Sragen
	Fasilitasi kontra penginderaan di OPD
	Fasilitasi Pengamanan Sinyal pada kegiatan penting OPD dan anggota Forkominda
	Fasilitasi document signing pada informasi publik milik pemerintah daerah

	Fasilitasi kirim terima berita antar OPD maupun antar pemerintah daerah
	Penyelenggaraan Security Operation Center
	Pelaksanaan Security Assessment pada aplikasi dan domain eGov milik pemerintah daerah
	Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
	Operasional LPPL/Radio Publik Kab. Sragen
Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Seluruh OPD	Pengukuran tingkat kesadaran pengamanan informasi milik pemerintah daerah di setiap OPD
	Pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan persandian daerah di setiap OPD
	Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian seluruh OPD

Program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat di lihat dalam tabel 5.1 **(terlampir)**.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Sragen yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuandan sasaran RPJMD 2013-2018 Kabupaten Sragen adalah dalam Misi Ke - 1 dari Visi Misi Bupati Sragen yaitu **Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan** dengan Tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (TIK) dengan Indikator Sasaran seperti pada Tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	%	30	45	60	80	90	95	100	100
2	Persentasi PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	%	0	0	-	10	30	40	50	50
3	Indeks SPBE	Indeks	2	2	-	2,5	3	3,2	3,3	3,3
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	-	-	-	24	30	40	50	50

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sragen tahun 2016 – tahun 2021 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen yang memuat tentang Program, Kegiatan dan Kebijakan serta Tujuan dan Sasaran. Renstra digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Tahunan dari Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan juga sebagai pedoman penyusunan dan pengembangan TIK Kabupaten Sragen ke depan..

Selain itu Renstra dipakai sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta lima tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target sasaran dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan sekaligus juga bisa mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sragen.

Sragen, Oktober 2018

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN

Ir. SIMON NUGROHO SY.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198812 1 001